

Kolaborasi Kodam IV/Diponegoro dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam Penguatan Keamanan Maritim melalui Pendekatan Multisektoral

Aridha Ulul Azmi Pakukuh^{1*}, Irfan Bagus Naufal^{1*}, Erwin Budi Afriyono^{1*},
Lukman Yudho Prakoso²

^{1,2}Universitas Pertahanan Republik Indonesia, Kawasan IPSC Sentul, Jl. Anyar, Sukahati, Kec. Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16810

aridha.pakukuh@km.idu.ac.id^{1*}, irfan.naufal@km.idu.ac.id^{1*}, erwin.afriyono@km.idu.ac.id^{1*},
lukman.prakoso@idu.ac.id²

*Corresponding author

Article Info

Article history:

Received : 30 Juni 2026

Revised : 07 Juli 2026

Accepted : 07 Juli 2026

Kata Kunci:

Collaborative Governance
Keamanan Maritim
Ketahanan Wilayah
Kodam IV/Diponegoro
Multisektoral

Abstract

Penelitian ini menganalisis kolaborasi antara Kodam IV/Diponegoro dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam penguatan keamanan maritim melalui pendekatan multisektoral. Jawa Tengah memiliki posisi strategis dalam pembangunan maritim nasional dengan garis pantai sepanjang 971,52 km, 33 pulau kecil, serta potensi besar pada sektor perikanan, pelabuhan, dan pariwisata bahari. Namun, wilayah ini juga menghadapi berbagai tantangan seperti abrasi, banjir rob, *Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing* (IUU Fishing), konflik pemanfaatan ruang laut, serta kerentanan sosial ekonomi masyarakat pesisir. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui studi dokumentasi dan kajian literatur. Analisis dilakukan menggunakan pendekatan *collaborative governance* untuk melihat sinergi antaraktor dalam pengelolaan keamanan maritim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi antara Kodam IV/Diponegoro dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berperan penting dalam deteksi dini ancaman, mitigasi bencana pesisir, perlindungan sumber daya laut, resolusi konflik sosial, dan peningkatan literasi keamanan maritim masyarakat pesisir. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berperan dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi pembangunan, sedangkan Kodam IV/Diponegoro mendukung melalui pembinaan teritorial, komunikasi sosial, deteksi dini, dan operasi kemanusiaan. Penelitian ini menegaskan bahwa pendekatan multisektoral berbasis *collaborative governance* menjadi strategi penting dalam mewujudkan keamanan maritim dan ketahanan wilayah pesisir yang berkelanjutan di Jawa Tengah.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki posisi strategis dalam konfigurasi geopolitik dan geoekonomi kawasan Indo-Pasifik. Karakteristik geografis tersebut menjadikan wilayah maritim bukan hanya sebagai ruang ekonomi, tetapi juga sebagai ruang pertahanan dan keamanan nasional (Bueger, 2015 ; Hattendorf, 2014).

Dalam konteks ini, keamanan maritim tidak lagi dipahami secara sempit sebagai pengamanan wilayah laut dari ancaman militer, melainkan mencakup pengelolaan sumber daya kelautan, perlindungan masyarakat pesisir, mitigasi bencana, penegakan hukum laut, hingga pembangunan ekonomi berbasis kelautan secara berkelanjutan (Bueger, 2015a ; UNEP, 2016).

Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu wilayah strategis nasional yang memiliki karakteristik maritim kompleks. Secara geografis, Jawa Tengah memiliki garis pantai sepanjang 971,52 Kilometer yang membentang di pesisir utara dan selatan Pulau Jawa (Rifka Alkhilyatul Ma'rifat, I Made Suraharta, 2024). Wilayah ini juga memiliki 33 pulau kecil yang tersebar di Laut Jawa dan Samudra Hindia. Kondisi tersebut memberikan potensi ekonomi kelautan yang besar, terutama pada sektor perikanan, pelabuhan, pariwisata bahari, dan logistik maritim. Namun di sisi lain, wilayah pesisir Jawa Tengah menghadapi berbagai ancaman seperti *illegal fishing*, abrasi, banjir rob, degradasi ekosistem pesisir, konflik pemanfaatan ruang laut, serta kerentanan sosial-ekonomi masyarakat nelayan. Data Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menunjukkan bahwa wilayah pesisir tersebar di 17 kabupaten/kota dengan dominasi aktivitas ekonomi berbasis kelautan pada kawasan Pantai Utara (Pantura). Potensi perikanan laut Jawa Tengah mencapai ratusan ribu ton per tahun dengan dominasi ikan pelagis kecil dan demersal. Namun intensitas eksploitasi sumber daya laut yang tinggi berpotensi memicu *overfishing* dan konflik pemanfaatan sumber daya maritim.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kawasan pesisir Jawa Tengah juga mengalami tekanan ekologis yang serius. Dinamika perubahan garis pantai akibat abrasi dan sedimentasi terjadi secara signifikan di wilayah Semarang, Demak, Pemalang, hingga Rembang. Penelitian Sardiyatmo et al. menemukan bahwa perubahan garis pantai di pesisir Semarang dipengaruhi oleh kombinasi faktor alam dan aktivitas manusia seperti reklamasi, konversi mangrove, serta pembangunan kawasan industri pesisir (Safitri et al., 2019). Penelitian lain di wilayah Pemalang menunjukkan abrasi pantai mencapai kategori berat hingga sangat berat akibat kerusakan mangrove dan peningkatan tekanan pembangunan pesisir. Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa keamanan maritim di Jawa Tengah tidak dapat diselesaikan melalui pendekatan sektoral tunggal. Kompleksitas ancaman membutuhkan model tata kelola kolaboratif (*collaborative governance*) yang melibatkan unsur pemerintah daerah, TNI, aparat penegak hukum, masyarakat pesisir, akademisi, serta sektor swasta (Ansell & Gash, 2008). Dalam konteks ini, keberadaan Kodam IV/Diponegoro menjadi penting sebagai bagian dari sistem pertahanan wilayah yang memiliki fungsi pembinaan teritorial dan dukungan terhadap stabilitas keamanan daerah. Peran Kodam IV/Diponegoro dalam konteks keamanan maritim tidak terbatas pada fungsi pertahanan konvensional, tetapi juga meluas pada dukungan penanggulangan bencana pesisir, pengamanan objek vital maritim, pemberdayaan masyarakat pesisir, serta penguatan koordinasi lintas sektor. Keterlibatan TNI AD dalam pembinaan wilayah pesisir mencerminkan paradigma keamanan modern yang bersifat multidimensional, dimana ancaman nonmiliter seperti kerusakan lingkungan, kemiskinan pesisir, dan konflik sosial dipandang sebagai bagian dari ancaman terhadap ketahanan nasional.

Dalam perspektif keamanan nasional, pendekatan multisektoral menjadi relevan karena ancaman maritim saat ini bersifat interconnected dan transnasional. Konsep keamanan maritim modern menempatkan laut sebagai domain strategis yang memerlukan sinergi antara aktor keamanan, aktor pembangunan, dan masyarakat sipil. Oleh sebab itu, penguatan keamanan maritim di Jawa Tengah membutuhkan kolaborasi kelembagaan antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kodam IV/Diponegoro dalam

bentuk koordinasi kebijakan, pertukaran informasi, penguatan kapasitas masyarakat pesisir, mitigasi bencana, serta pengawasan wilayah maritim secara terpadu.

Tabel 1. Kondisi Maritim Jawa Tengah

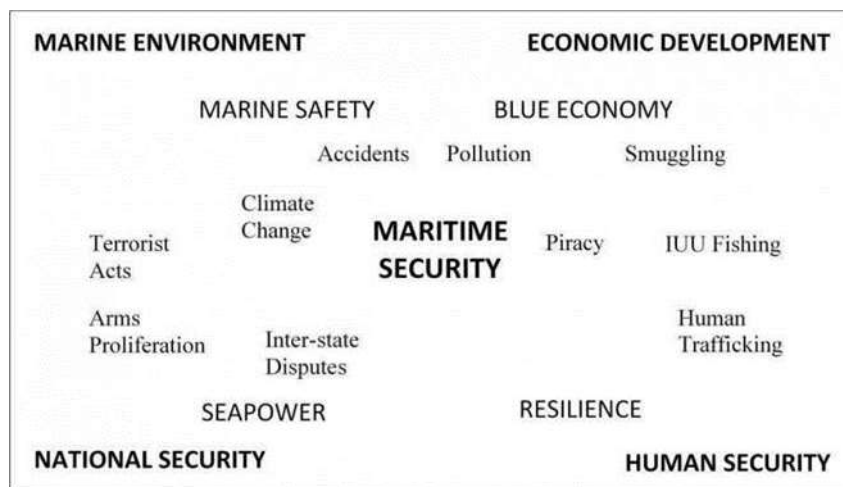
Indikator	Data
Panjang garis pantai Jawa Tengah	971,52 km
Pantai utara	645,08 km
Pantai selatan	326,44 km
Jumlah pulau kecil	33 pulau
Wilayah pesisir	17 kabupaten/kota
Ancaman utama	Abrasi, rob, illegal fishing, konflik ruang laut
Potensi utama	Perikanan, pelabuhan, pariwisata bahari

(Sumber: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Tengah (2024))

KAJIAN TEORI

Konsep Keamanan Maritim (*Maritime Security*)

Keamanan maritim merupakan konsep multidimensional yang mencakup perlindungan wilayah laut dari ancaman militer maupun nonmiliter. Menurut Bueger (2015a), keamanan maritim merupakan konsep multidimensional yang mencakup empat dimensi utama, yaitu keamanan nasional (*national security*), pembangunan ekonomi laut (*blue economy*), keselamatan manusia (*human security*), dan perlindungan lingkungan laut (*marine environment*). Pendekatan ini menempatkan laut sebagai ruang strategis yang harus dijaga secara komprehensif. Secara konseptual, keamanan maritim dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Diamond Model Keamanan Maritim
(Sumber: Buerger (2015))

Keterangan:

- Keamanan Nasional → pertahanan wilayah, kedaulatan laut, pengamanan objek vital.
- Ekonomi Biru (*Blue Economy*) → perikanan, pelabuhan, logistik, pariwisata bahari.
- *Human Security* → keselamatan nelayan, mitigasi bencana, kesejahteraan masyarakat pesisir.
- Lingkungan Kelautan → mangrove, abrasi, rob, konservasi pesisir.

Dalam konteks Jawa Tengah, ancaman keamanan maritim tidak hanya berupa pelanggaran wilayah atau *illegal fishing*, tetapi juga mencakup abrasi, rob, eksploitasi

sumber daya laut, dan konflik sosial pesisir. Karena itu, pendekatan keamanan maritim harus bersifat integratif dan berbasis *collaborative governance*.

Collaborative Governance

Ansell & Gash (2008) mendefinisikan *collaborative governance* sebagai proses pengambilan keputusan kolektif yang melibatkan institusi pemerintah dan aktor nonpemerintah dalam forum formal yang berorientasi pada konsensus. Dia menekankan pentingnya kolaborasi antara institusi pemerintah dan aktor nonpemerintah dalam menyelesaikan persoalan publik yang kompleks. Kolaborasi dibangun melalui dialog, koordinasi, kepercayaan institusional, dan pembagian tanggung jawab.

$$f(f) = C + f + f + f$$

Ilustrasi di atas menggambarkan bahwa keberhasilan tata kelola kolaboratif merupakan fungsi dari:

- **C (Collaboration)** = sinergi antar lembaga,
- **G (Governance)** = tata kelola yang efektif,
- **P (Participation)** = partisipasi masyarakat,
- **M (Multi-sector integration)** = integrasi lintas sektor.

Dalam penelitian ini, *collaborative governance* diwujudkan melalui sinergi antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Kodam IV/Diponegoro, Pemerintah kabupaten/kota pesisir, Nelayan dan masyarakat pesisir, Akademisi, Lembaga penegak hukum maritim.

Ketahanan Nasional dan Pembinaan Teritorial

Ketahanan nasional merupakan kondisi dinamis bangsa yang mencerminkan keuletan dan ketangguhan dalam menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan (Susdarwono et al., 2020). Dalam konteks maritim, ketahanan nasional sangat dipengaruhi oleh stabilitas wilayah pesisir dan keberlanjutan sumber daya laut.

Kodam IV/Diponegoro memiliki fungsi pembinaan teritorial yang bertujuan memperkuat kemanunggalan TNI dan rakyat. Pembinaan teritorial merupakan salah satu fungsi utama TNI Angkatan Darat yang bertujuan memperkuat kemanunggalan TNI dengan rakyat dalam mendukung pertahanan negara (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, 2004). Dalam konteks keamanan maritim, pembinaan teritorial dapat diwujudkan melalui, Edukasi masyarakat pesisir, Mitigasi bencana, Pemberdayaan nelayan, Dukungan keamanan kawasan strategis, Penguatan ketahanan sosial masyarakat pesisir.

Model hubungan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2. Model hubungan kolaborasi Kodam IV Diponegoro dan Pemprov Jateng
(Sumber: analisis penulis)

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode kualitatif deskriptif untuk menganalisa kolaborasi antara Kodam IV/Diponegoro dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam penguatan keamanan maritim melalui pendekatan multisektoral.

Lokasi dan Fokus Penelitian

Lokasi penelitian di Provinsi Jawa Tengah dimana memiliki garis pantai 971,52 Km, 33 pulau kecil, serta aktivitas perikanan dan ekonomi maritim yang strategis. Sementara itu, fokus penelitian ini bertujuan untuk analisis potensi dan tantangan keamanan maritim, peran Kodam IV/Diponegoro dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, serta model kolaborasi multisektoral yang dapat mendukung penguatan keamanan maritim dan ketahanan wilayah.

Sumber Data

Sumber data penelitian terdiri atas data sekunder yang diperoleh dari dokumen resmi dan literatur akademik. Data tersebut meliputi paparan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dokumen perencanaan pembangunan daerah, publikasi dari Badan Pusat Statistik (BPS), Dinas Kelautan dan Perikanan Kota/Kabupaten, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kodam IV/Diponegoro. Selain itu, penelitian juga memanfaatkan berbagai artikel ilmiah yang membahas konsep keamanan maritim (*maritime security*), collaborative governance, ketahanan nasional, pembinaan teritorial, dan resolusi konflik masyarakat.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan kajian literatur, sebagaimana berikut:

- a. Studi dokumentasi: mengidentifikasi kebijakan, program, dan data statistik yang berkaitan dengan keamanan maritim di Jawa Tengah.
- b. Kajian literatur: landasan teoritis yang mendukung analisis mengenai tata kelola kolaboratif, keamanan maritim, dan ketahanan nasional daerah.

Teknik Analisa Data

Analisis data dilakukan menggunakan model analisis interaktif yang meliputi tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Validitas Data

Penelitian menerapkan teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi yang diperoleh dari dokumen pemerintah, data statistik resmi, regulasi, dan literatur akademik. Bertujuan untuk memastikan konsistensi informasi serta meningkatkan kredibilitas hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Potensi dan Tantangan Maritim Jawa Tengah

Potensi Maritim Jawa Tengah

Jawa Tengah memiliki posisi strategis dalam pembangunan maritim nasional karena berada di antara Laut Jawa dan Samudra Hindia yang menjadikannya salah satu koridor logistik dan perikanan penting di Indonesia (DKP Jawa Tengah, 2024). Dengan panjang garis pantai yang mencapai 971,52 Kilometer dan keberadaan 33 pulau kecil, Jawa Tengah memiliki modal geografis yang kuat untuk mengembangkan sektor kelautan sebagai penggerak pembangunan daerah. Potensi tersebut terlihat dari besarnya aktivitas ekonomi yang berkembang di wilayah pesisir. Sektor perikanan masih menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat di berbagai kabupaten pesisir Jawa Tengah, seperti Rembang, Pati, Batang, Pekalongan, Tegal, dan Cilacap. Aktivitas penangkapan ikan, budidaya tambak, hingga industri pengolahan hasil perikanan tidak hanya menyediakan

lapangan pekerjaan, tetapi juga berkontribusi terhadap ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Selain perikanan, keberadaan pelabuhan dan jalur pelayaran menjadikan Jawa Tengah sebagai salah satu simpul penting dalam jaringan logistik nasional. Pelabuhan Tanjung Emas Semarang misalnya, memiliki peran strategis dalam mendukung distribusi barang dan mobilitas ekonomi di Pulau Jawa. Tingginya aktivitas transportasi laut memberikan peluang bagi berkembangnya investasi, perdagangan, serta industri yang berbasis pada sektor maritim. Potensi lain yang terus berkembang adalah pariwisata bahari. Kawasan Karimun Jawa telah menjadi salah satu destinasi wisata unggulan yang menarik wisatawan domestik maupun mancanegara. Kekayaan ekosistem laut, terumbu karang, dan keindahan pantai menjadi daya tarik utama yang dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat. Di sisi lain, wilayah pesisir selatan Jawa Tengah juga memiliki potensi wisata yang besar dan masih dapat dikembangkan.

Tidak kalah penting, Jawa Tengah memiliki sumber daya ekologis yang berperan sebagai penyangga ketahanan wilayah pesisir. Keberadaan hutan mangrove, padang lamun, dan kawasan konservasi laut berfungsi menjaga keseimbangan lingkungan sekaligus melindungi kawasan pesisir dari berbagai ancaman alam. Potensi ekologis ini menjadi aset strategis yang mendukung keberlanjutan pembangunan maritim dalam jangka panjang.

Tantangan Keamanan Maritim Jawa Tengah

Di balik berbagai potensi yang dimiliki, Jawa Tengah juga menghadapi sejumlah tantangan yang dapat memengaruhi stabilitas dan keamanan wilayah maritim. Tantangan tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek penegakan hukum di laut, tetapi juga mencakup persoalan lingkungan, sosial, dan ekonomi yang saling berkaitan. Salah satu persoalan yang paling menonjol adalah abrasi dan perubahan garis pantai yang terjadi di sejumlah wilayah pesisir seperti Semarang, Demak, Pemalang, dan Rembang. Fenomena ini menyebabkan berkurangnya luas daratan, kerusakan infrastruktur pesisir, serta menurunnya kualitas lingkungan yang menjadi sumber penghidupan masyarakat. Pada penelitian yang telah dibahas sebelumnya menunjukkan bahwa perubahan garis pantai di Jawa Tengah dipengaruhi oleh kombinasi faktor alam dan aktivitas manusia, termasuk alih fungsi lahan pesisir serta berkurangnya kawasan mangrove.

Tantangan lain yang semakin nyata adalah banjir rob yang kerap terjadi di kawasan Pantai Utara Jawa. Fenomena abrasi dan banjir rob di kawasan Pantai Utara Jawa menunjukkan bahwa ancaman keamanan maritim tidak hanya berasal dari aktivitas ilegal di laut, tetapi juga dari perubahan iklim dan degradasi lingkungan pesisir (BNPB, 2024 dan Safitri et al., 2019). Kenaikan muka air laut yang diperparah oleh fenomena penurunan muka tanah menyebabkan sebagian wilayah pesisir mengalami tekanan lingkungan yang semakin besar. Dampaknya tidak hanya berupa kerugian ekonomi, tetapi juga mengganggu aktivitas sosial, transportasi, dan pelayanan publik. Dalam konteks keamanan maritim, kondisi ini menunjukkan bahwa ancaman terhadap wilayah maritim tidak selalu berasal dari aktivitas kriminal atau pelanggaran hukum, tetapi juga dari perubahan lingkungan yang dapat mengurangi ketahanan wilayah.

Dari aspek pemanfaatan sumber daya laut, ancaman *Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing* (IUU Fishing) masih menjadi tantangan yang perlu diwaspadai. Selain berpotensi merugikan nelayan lokal, praktik tersebut juga dapat mengganggu keberlanjutan sumber daya perikanan yang menjadi salah satu aset utama Jawa Tengah. Di sisi lain, meningkatnya kebutuhan pembangunan sering kali menimbulkan konflik pemanfaatan ruang laut antara sektor perikanan, pelabuhan, industri, pariwisata, dan konservasi lingkungan. Permasalahan sosial ekonomi masyarakat pesisir juga menjadi

tantangan tersendiri. Sebagian nelayan tradisional masih menghadapi keterbatasan akses terhadap teknologi, informasi cuaca, permodalan, dan pasar. Kondisi tersebut menyebabkan tingkat kerentanan masyarakat pesisir relatif lebih tinggi dibandingkan kelompok masyarakat lainnya. Apabila tidak diantisipasi, kerentanan ekonomi dapat berkembang menjadi persoalan sosial yang berdampak pada stabilitas kawasan pesisir.

Tabel 2. Potensi dan Tantangan Maritim Jawa Tengah

Potensi Maritim	Tantangan yang Dihadapi	Dampak terhadap Keamanan Maritim
Sumber daya perikanan yang melimpah	IUU <i>Fishing</i> dan eksploitasi berlebihan	Menurunnya keberlanjutan sumber daya laut
Pelabuhan dan jalur logistik strategis	Penyelundupan dan pelanggaran hukum	Gangguan terhadap aktivitas ekonomi maritim
Pariwisata bahari yang berkembang	Kerusakan lingkungan pesisir itu	Menurunnya daya saing destinasi wisata
Ekosistem mangrove dan pesisir	Abrasi, rob, dan perubahan iklim	Meningkatnya kerentanan wilayah pesisir
Komunitas nelayan yang produktif	Keterbatasan ekonomi dan teknologi	Potensi kerawanan sosial masyarakat pesisir
Posisi geografis strategis	Konflik pemanfaatan ruang laut	Meningkatnya kebutuhan koordinasi lintas sektor

(Sumber: Diolah oleh penulis)

Implikasi Potensi dan Tantangan terhadap Penguatan Keamanan Maritim

Potensi dan tantangan yang dimiliki Jawa Tengah menunjukkan bahwa keamanan maritim merupakan isu yang bersifat multidimensional. Keamanan maritim tidak hanya berkaitan dengan pengawasan wilayah laut dan penegakan hukum, tetapi juga menyangkut perlindungan sumber daya alam, ketahanan ekonomi masyarakat pesisir, serta kemampuan daerah dalam menghadapi ancaman lingkungan dan bencana. Kondisi tersebut sejalan dengan konsep *maritime security* yang menempatkan aspek keamanan, pembangunan ekonomi, keselamatan manusia, dan perlindungan lingkungan sebagai satu kesatuan yang saling berkaitan. Oleh karena itu, pendekatan yang bersifat sektoral tidak lagi memadai untuk menjawab kompleksitas permasalahan maritim yang berkembang saat ini. Dalam perspektif *collaborative governance*, penguatan keamanan maritim memerlukan keterlibatan berbagai aktor yang memiliki sumber daya dan kewenangan berbeda. Pemerintah daerah memiliki peran dalam penyusunan kebijakan dan pengelolaan pembangunan wilayah pesisir, sementara aparat keamanan berperan dalam menjaga stabilitas wilayah dan mendukung upaya mitigasi berbagai ancaman. Di sisi lain, masyarakat pesisir, akademisi, dan sektor swasta juga memiliki kontribusi penting dalam menciptakan tata kelola maritim yang efektif.

Dengan demikian, berbagai potensi dan tantangan maritim yang dihadapi Jawa Tengah menjadi dasar penting bagi lahirnya model kolaborasi lintas sektor dalam penguatan keamanan maritim. Dalam konteks penelitian ini, kondisi tersebut menjelaskan mengapa sinergi antara Kodam IV/Diponegoro dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menjadi kebutuhan strategis, bukan sekadar pilihan kebijakan. Kolaborasi kedua institusi tersebut diharapkan mampu mengintegrasikan aspek keamanan, pembangunan, mitigasi bencana, dan pemberdayaan masyarakat sehingga tercipta ketahanan wilayah maritim yang lebih kuat dan berkelanjutan.

Kolaborasi Kodam IV/Diponegoro dan Pemprov Jateng



Gambar 3. Model Kolaborasi Kodam IV/Diponegoro dalam Keamanan Maritim di Jawa Tengah
(Sumber: Diolah oleh penulis)

Penguatan keamanan maritim di Provinsi Jawa Tengah memerlukan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan karena ancaman yang berkembang saat ini tidak hanya berupa pelanggaran hukum di laut, tetapi juga mencakup bencana pesisir, konflik sosial, kerusakan lingkungan, serta kerentanan ekonomi masyarakat pesisir. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keamanan maritim merupakan isu multidimensional yang melibatkan aspek keamanan, ekonomi, lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat (Bueger, 2015a). Kompleksitas permasalahan tersebut menuntut adanya kolaborasi yang mampu mengintegrasikan sumber daya, kewenangan, dan kapasitas masing-masing institusi. Dalam konteks tersebut, sinergi antara Kodam IV/Diponegoro dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menjadi salah satu bentuk implementasi pendekatan multisektoral dalam mendukung keamanan maritim daerah.

Berdasarkan perspektif *collaborative governance*, keberhasilan pengelolaan keamanan maritim sangat dipengaruhi oleh kemampuan para aktor untuk membangun komunikasi, kepercayaan, dan tujuan bersama dalam menyelesaikan permasalahan publik (Ansell & Gash, 2008). Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memiliki kewenangan dalam penyusunan kebijakan, pengalokasian sumber daya, serta koordinasi pembangunan wilayah pesisir sesuai dengan Undang-Undang RI No 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dan Undang-Undang RI No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sementara itu, Kodam IV/Diponegoro memiliki kemampuan pembinaan teritorial, deteksi dini, komunikasi sosial, dan dukungan operasi kemanusiaan yang berperan dalam menjaga stabilitas wilayah merupakan implementasi dari fungsi TNI dalam operasi militer selain perang sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Perbedaan fungsi tersebut menciptakan hubungan yang saling melengkapi dalam mendukung keamanan maritim yang berkelanjutan.

Dari aspek keamanan wilayah, keberadaan satuan teritorial Kodam IV/Diponegoro hingga tingkat desa memberikan keuntungan strategis dalam memperoleh informasi awal mengenai berbagai potensi gangguan keamanan di kawasan pesisir. Informasi

tersebut dapat digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, terutama dalam merumuskan langkah-langkah preventif terhadap konflik sosial, sengketa pemanfaatan ruang pesisir, maupun aktivitas yang berpotensi mengganggu stabilitas wilayah.

Selain aspek keamanan, kolaborasi kedua institusi juga memiliki peran penting dalam meningkatkan kesiapsiagaan bencana pesisir. Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi yang rentan terhadap banjir rob, abrasi pantai, cuaca ekstrem, dan dampak perubahan iklim yang mengancam kehidupan masyarakat pesisir. Dalam kondisi tersebut, Kodam IV/Diponegoro berperan sebagai unsur pendukung dalam operasi kemanusiaan melalui penyediaan personel, sarana evakuasi, dan bantuan logistik, sedangkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bertanggung jawab dalam koordinasi kebijakan, perencanaan mitigasi, serta pemulihan pascabencana. Sinergi antara Kodam IV/Diponegoro dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mencerminkan implementasi pendekatan *whole of government* dalam penguatan keamanan maritim daerah (Ansell & Gash, 2008 ; Bueger, 2015a)

Lebih lanjut, kolaborasi antara Kodam IV/Diponegoro dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah turut berkontribusi terhadap perlindungan sumber daya kelautan dan perikanan. Jawa Tengah memiliki potensi perikanan yang besar dan menjadi salah satu penopang ketahanan pangan nasional. Namun demikian, potensi tersebut masih menghadapi berbagai tantangan seperti praktik *Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing* (IUU Fishing), pencemaran lingkungan, serta eksploitasi sumber daya yang tidak berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan sinergi dalam bentuk edukasi kepada masyarakat nelayan, peningkatan kesadaran hukum, serta penguatan pengawasan melalui koordinasi dengan instansi terkait agar pemanfaatan sumber daya laut dapat berlangsung secara berkelanjutan. Meskipun demikian, hasil analisis menunjukkan bahwa kolaborasi yang telah terbangun masih menghadapi beberapa tantangan. Pertama, belum optimalnya integrasi data dan informasi antarinstansi yang dapat memengaruhi kecepatan pengambilan keputusan. Kedua, koordinasi yang masih bersifat sektoral menyebabkan beberapa program belum berjalan secara terpadu. Ketiga, luasnya wilayah pesisir Jawa Tengah memerlukan dukungan sumber daya manusia dan sarana yang memadai agar pengawasan dapat dilakukan secara efektif. Tantangan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas kolaborasi tidak hanya ditentukan oleh adanya kerja sama formal, tetapi juga oleh kualitas koordinasi, komunikasi, dan komitmen antarlembaga.

Tabel 3. Matriks Kolaborasi Kodam IV/Diponegoro dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam Penguatan Keamanan Maritim

Kolaborasi	Peran Kodam IV/Diponegoro	Peran Pemprov Jawa Tengah	Hasil yang Diharapkan
Deteksi dini ancaman	Pengumpulan informasi kewilayahan dan pemetaan potensi gangguan	Penyusunan kebijakan berbasis data	Pencegahan gangguan keamanan maritim
Mitigasi bencana pesisir	Dukungan personel, evakuasi, dan operasi kemanusiaan	Koordinasi BPBD dan OPD terkait	Meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat
Perlindungan sumber daya laut	Pembinaan masyarakat pesisir dan komunikasi sosial	Pengelolaan sumber daya kelautan	Pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan
Resolusi konflik sosial	Mediasi dan deteksi dini konflik	Fasilitasi penyelesaian konflik	Stabilitas sosial wilayah pesisir

Literasi keamanan maritim	Bela negara dan wawasan kebangsaan	Sosialisasi regulasi dan kebijakan	Meningkatnya kesadaran masyarakat
---------------------------	------------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------

(Sumber: Diolah oleh penulis)

KESIMPULAN, REKOMENDASI, KETERBATASAN

Jawa Tengah memiliki potensi kemaritiman yang strategis sekaligus kerentanan pesisir yang kompleks. Garis pantai sepanjang 971,52 km, 17 kabupaten/kota pesisir, produksi perikanan tangkap 554.181 Ton dan budidaya pembesaran 553.708 Ton pada 2024, serta keberadaan pulau-pulau kecil menunjukkan posisi penting provinsi ini dalam ekonomi dan ketahanan pangan maritim nasional. Pada saat yang sama, frekuensi bencana hidrometeorologi yang tinggi, ancaman IUU *fishing*, dan kompleksitas konflik pesisir menempatkan keamanan maritim nontradisional sebagai isu strategis yang membutuhkan pendekatan multisektoral. Dalam kerangka collaborative governance, kolaborasi Kodam IV/Diponegoro dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menjadi relevan apabila ditempatkan secara proporsional, yaitu Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berperan sebagai pengarah kebijakan, koordinator organisasi perangkat daerah, regulator, pengelola anggaran, dan integrator data, sedangkan Kodam IV/Diponegoro berperan sebagai pendukung melalui Pembinaan Teritorial, Komunikasi Sosial, deteksi dini, dan Operasi Militer Selain Perang dalam bantuan kemanusiaan sesuai mandat Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Pembagian peran yang jelas ini menghindari tumpang tindih kewenangan, menghormati supremasi sipil, dan memperkuat kepercayaan antar aktor sebagai prasyarat keberhasilan kolaborasi multisektoral.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan empat langkah strategis yang saling berkaitan. Pertama, membentuk atau mengoptimalkan Forum Koordinasi Keamanan Maritim Daerah Jawa Tengah sebagai ruang pertukaran data dan penyelarasan program lintas sektor, dengan sekretariat dilekatkan pada Bappeda dan anggota tetap mencakup organisasi perangkat daerah terkait, Kodam IV/Diponegoro, Polda Jawa Tengah, Bakamla, KKP, dan perguruan tinggi. Kedua, mengembangkan sistem deteksi dini terpadu untuk bencana hidrometeorologi dan konflik pesisir melalui integrasi data BPBD, Kodim, POKMASWAS, dan Bakamla. Ketiga, meningkatkan literasi keamanan maritim di kalangan masyarakat pesisir melalui modul yang disusun bersama perguruan tinggi dan disampaikan melalui jaringan teritorial Kodam serta organisasi perangkat daerah provinsi. Keempat, memperkuat kebijakan berbasis data dan riset dengan menyelenggarakan kegiatan Kuliah Kerja Dalam Negeri yang terstruktur untuk mahasiswa, sehingga akademisi turut berkontribusi pada perumusan kebijakan keamanan maritim daerah.

Penelitian ini memiliki sejumlah pembatasan yang perlu disampaikan secara jujur. Kajian terbatas pada studi dokumen dan belum melakukan wawancara mendalam dengan Kodam IV/Diponegoro, pejabat Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, aparat penegak hukum maritim, pemerintah kabupaten/kota pesisir, kelompok nelayan, maupun Focus Group Discussion. Konsekuensinya, hasil penelitian bersifat analisis konseptual kebijakan dan bukan pengukuran dampak empiris di lapangan. Kajian lanjutan perlu dilengkapi metode kualitatif primer di wilayah pesisir terpilih untuk mendapatkan persepsi langsung aktor lapangan dan pengukuran empiris efektivitas kolaborasi. Selain itu, riset masa depan dapat memperluas lensa analitis dengan studi komparatif antar provinsi pesisir di Indonesia untuk memperkaya pemahaman tentang model kolaborasi sipil militer dalam tata kelola keamanan maritim nontradisional.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571.
<https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>.
- BNPB. (2024). *Data Bencana Indonesia 2024*.
- Bueger, C. (2015a). What is maritime security? *Marine Policy*, 53, 159–164.
<https://doi.org/10.1016/j.marpol.2014.12.005>.
- Hattendorf, J. B. (2014). *Seapower : A Guide for the Twenty-First Century*. 67(4).
- Rifka Alkhilyatul Ma'rifat, I Made Suraharta, I. I. J. (2024). *Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Tengah TA 2024*. 2, 306–312.
- Safitri, F., Suryani, & Febrianto, S. (2019). ANALISIS PERUBAHAN GARIS PANTAI AKIBAT EROSI DI PESISIR KOTA SEMARANG (Coastline Change Analysis due to Erosion in Coastal of Semarang City). *Analisis Perubahan Garis Pantai Akibat Erosi Di Pesisir Kota Semarang*, 25(1), 37–46.
- Susdarwono, E. T. R. I., Komunikasi, D. I., & Peradaban, U. (2020). *Indonesia PEMBAHARUAN PENDIDIKAN PASKA ADAPTASI KEBIASAAN BARU National Resilience by Focusing on the Development and Renewal of Education After the Adaptation of New Habits Nasional Republik Indonesia*.
- Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah (2024). *Statistik Perikanan Jawa Tengah*. 1–61.
- Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia No 34 Tahun 2004 tentang TNI
- Undang-Undang Republik Indonesia No 32 Tahun 2014 tentang Kelautan
- UNEP, G.-A. and. (2016). World Ocean Assessment. *Chapter 27 Tourism and Recreation, II*, 1–32.